

**LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



OLEH :

DINDA EMILIA

158520005

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



OLEH :

DINDA EMILIA

158520005

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul KKL : Laporan KKL Dan Pengesahan Laporan KKL
Tempat KKL : Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov- SU
Nama : Dinda Emilia
Npm : 158520005
Program studi : Administrasi Publik
Fakultas : Isipol

Mengesahkan

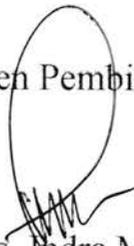
Medan, 15 oktober 2018

Mahasiswa pelaksana KKL



(Dinda Emilia)

Dosen Pembimbing Lapangan



(Drs. Indra Muda, MAP)

Wakil dekan bidang akademik



(Beby Masitho BB, S.Sos.MAP)

Ketua prodi administrasi publik



(Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd)

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan.....	i
Kata pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang pelaksanaan KKL.....	1
B. Tujuan pelaksanaan KKL.....	2
C. Alasan pemilihan lokasi KKL.....	3

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fraksi.....	4
B. pengertian partai politik.....	4
a. tujuan partai politik.....	5
b. fungsi partai politik.....	5
C. pengertian partai hanura.....	8
• visi dan misi partai hanura.....	8

BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL

A. Sejarah singkat.....	10
B. Struktur organisasi.....	14

BAB IV PEMBAHASAN

A. jenis kegiatan KKL.....	21
B. kegiatan selama KKL.....	25
C. analisa pelaksanaan kegiatan.....	27

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan.....	28
B. saran.....	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan Nikmat kehidupan dan Kesehatan serta petunjuknya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL).

Perlu diketahui bahwa Dengan adanya kegiatan KKL ini maka mahasiswa diharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya yang mungkin tidak akan di dapatkan di dunia perkuliahan. Karena kegiatan KKL ini adalah pengaplikasian dari teori yang sudah diajarkan pada semester sebelumnya di perkuliahan agar kedepannya dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya.

Di dalam kegiatan ini mahasiswa di tuntut agar dapat menyampaikan ide nya, kerjasamanya dan melakukan komunikasi yang baik selama kegiatan KKL berlangsung. Dan mahasiswa juga harus tanggap dalam melihat gejala-gejala atau fenomena apa saja yang terjadi selama mahasiswa melakukan KKL di tempat tersebut.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, terlebih jika tanpa bimbingan serta doa dan semangat dari semua pihak yang turut membantu saya dalam pembuatan laporan ini, penulis hanya dapat mengucapkan bayak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan KKL ini. Oleh karena itu penulis mengharapakan saran dan kritik yang dapat menjadikan laporan ini lebih baik untuk kedepan nya.

Medan, 15 September 2018

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KKL

Salah satu program studi yang dinilai dapat mengembangkan wawasan, keterampilan, kecakapan dan kreativitas seorang mahasiswa untuk memasuki dunia kerja adalah dengan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Dimana setiap mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Lapangan dituntut harus mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk bersosialisasi dan mempraktekan secara langsung ilmu yang sudah didapatkan dari bangku kuliah ke dunia kerja. Secara garis besar seperti yang kita lihat bahwa pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka mahasiswa tentunya perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung di instansi atau lembaga - lembaga yang berkaitan dengan program studi yang ditempuh.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Universitas Medan Area merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya bagi para mahasiswa tingkat akhir di semester VI, dan tentunya setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan serta membuat laporan Kuliah Kerja Lapangan. Selain pengalaman yang didapat sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan itu sendiri menjadi tolak ukur bagi Universitas Medan Area dalam melihat etos kerja yang dimiliki oleh

setiap mahasiswa. Sesuai dengan tujuan Universitas Medan Area, yang mempersiapkan tenaga ahli dan terampil yang diharapkan dapat terjun langsung ke dunia industri/kerja, maka dipandang sangat perlunya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan.

Besar kemungkinan dengan melalui program Kuliah Kerja Lapangan ini mahasiswa dapat memahami langsung struktur organisasi dalam sebuah manajemen, profesionalitas kerja, kedisiplinan dan masih banyak hal lainnya. Dengan banyaknya hal positif yang akan didapat maka penulis berkesempatan untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan pada instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara (DPRD-SU). Alasan penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan di perusahaan ini, tentunya penulis berharap mendapatkan ilmu secara langsung mengenai praktek kerja yang sesungguhnya khususnya dalam ilmu Administrasi Negara. Sehingga penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga yang bisa diambil dari lingkungan tempat Kuliah Kerja Lapangan pada instansi DPRD-SU.

B. TUJUAN PELAKSANAAN KKL

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mata Kuliah Kerja Lapangan.
2. Melatih kemampuan bahasa jepang yang telah dipelajari dan menggunakannya dalam dunia kerja.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat penulis dalam pelaksanaan dunia kerja.
4. Meningkatkan wawasan dan pengalaman serta lebih menanamkan disiplin yang tinggi untuk diterapkan dalam dunia kerja.

C. ALASAN PEMILIHAN LOKASI KKL

Penulis memilih lokasi di DPRD Provunsi sumatera utara, karena ingin mengetahui Tugas dan Fungsi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Prov Sumater utara dan mengetahui Bagian-bagian yang ada di DPRD Provinsi sumatera utara, dan juga untuk mengaplikasikan teori yang sudah dipeajari di semester sebelumnya sesuai dengan prodi Administrasi publik

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fraksi

suatu kelompok dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian, biasanya satu partai.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, fraksi adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Lebih lanjut ditegaskan dalam Tatib tersebut bahwa fraksi bersifat mandiri.

B. Partai Politik

a) Pengertian Partai Politik

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan

stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi

tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun

b) Tujuan Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

c) Fungsi Partai Politik

Fungsi parpol sebagai sarana:

- **Parpol sebagai saran komunikasi politik**

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

Contoh: misal dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misalnya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interaksi antara siswa(masyarakat), OSIS (parpol) dan pihak sekolah

(pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebagai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah. Dalam kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat diibaratkan para siswa itu masyarakat, OSIS itu Parpol, dan pihak sekolah itu Pemerintah.

- Parpol sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian , diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik

- Parpol sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa

jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Contoh: misal seperti pada contoh komunikasi politik tadi, dilingkungan sekolah. OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Nah proses OSIS tersebut dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penunjukan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama halnya dengan Papol, parpol akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

- Parpol sebagai saran pengatur konflik

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat(DPR/DPRD/Camat)untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Contoh: di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini

parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol dalam hal ini berfungsi sebagai mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

C. Partai Hanura

Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Hanura, adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari Partai Hanura :

- **VISI PARTAI HANURA**

“Terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

- **MISI PARTAI HANURA :**

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan senantiasa berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati nurani.
3. Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara

4. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berwawasan nasional.
5. Memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
6. Membangun sistem perekonomian nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
7. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.
8. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL

A. SEJARAH SINGKAT

1) DPRD-SU

Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur – angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah – daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari – hari dan

kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu :

Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi.

Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu :

1. Propinsi Sumatera Utara
2. Propinsi Sumatera Tengah
3. Propinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu.

Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 /

1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.

Di DPRD-SU terdapat sembilan fraksi yaitu partai keadilan sejahtera, partai golongan karya, partai demokrasi indonesia perjuangan, partai demokrat, partai gerakan indonesia raya, partai hanura, partai amanat nasional, partai nasdem, dan partai keadilan bangsa.

2) FRAKSI HANURA

Persiapan Hanura menuju kontestasi Pemilihan Umum 2014 agak terganggu, setelah Akbar Faisal, yang dikenal sebagai vokalis Hanura di Senayan, mengundurkan diri.[3] Akbar mengaku ingin cari suasana politik baru dan merasa jenuh dengan tugas kedewanan yang diembannya. Namun pada akhirnya dia diumumkan sebagai Ketua DPP Bidang Politik Partai Nasdem[4] oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.

Meskipun demikian, pada 17 Februari 2013, Hanura mendapat tambahan kekuatan partai menyusul bergabungnya pengusaha sekaligus Bos MNC Group, Hary Tanoë.[5] Mantan politisi Nasdem itu dianggap mampu untuk membangun citra Partai Hanura[6] lewat kekuatan media[7] yang dimilikinya.

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan Hanura, yaitu:[8]

1. Partai Kedaulatan
2. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
3. Partai Nasional Republik (Nasrep)

4. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
6. Partai Kongres
7. Partai Damai Sejahtera (PDS)
8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

B. STRUKTUR ORGANISASI

Fraksi partai Hanura

Penasehat	: Aduhot simamora
Ketua	: Toni Togatorop,SE,MM
Sekretaris	: H.Fahrizal Efendi Nst,SH
Anggota	: 1. Firman sitorus,SE 2.Rinawati sianturi,SH 3.Sujian 4.Ebenejer Sitorus,SE 5.Fanatona Waruwu 6.Ir.H. Darwin Lubis 7.H.Robby Anangga,SE

Susunan Nama Anggota Fraksi Hanura Yang Ditugaskan Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

A. Badan Anggaran

1. Toni Togatorop,SE.MM
2. Firman Sitorus,SE
3. Sujian
4. Ir.H Darwin Lubis
5. H.Fahrizal Efendi Nasution,SH

Mempunyai Tugas yaitu :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD kepada gubernur dalam rangka mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat lima bulan sebelum ditetapkan APBD.
- b. Melakukan koordinasi kepada komisi-komisi dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, prioritas dan Plafon anggaran sementara serta usul rencana program kerja dan anggaran para SKPD mitra kerja komisi-komisi
- c. Memberi saran kepada gubernur dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- d. Melakukan penyempurnaan rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri dalam negeri bersama tim anggaran pemerintah daerah.

- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran, sementara yang disampaikan oleh gubernur untuk dijadikan acuan dalam rancangan APBD.
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- g. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh gubernur.
- h. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap draft rancangan APBD.
- i. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD
- j. Membahas dan mengevaluasi triwulan gubernur
- k. Menyampaikan hasil kerjanya selama tahun anggaran pimpinan dewan dan fraksi-fraksi

B. Badan Musyawarah

1. H.Fahrizal Efendi Nasution,SH
2. Fanatona Waruwu
3. Ebenejer Sitorus,SE
4. H.Robby Anangga,SE

Mempunyai tugas yaitu :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPRD untuk mengubahnya.
- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD.
- c. Meminta atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain, untuk memberikan keterangan penjelasan mengenai tugas masing-masing.
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
- e. Memberikan saran dan pendapat untuk memperlanjut kegiatan
- f. Merekomendasi pembentukan panitia khusus
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna DPRD kepada badan musyawarah.
- h. Menyampaikan hasil kerjanya selama tahun anggaran kepada pimpinan dewan dan fraksi-fraksi

C. Badan BPPD

1. H.Robby Anangga

Mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta

- alasanya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah.
 - c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantauan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi dan gabungan komisi sebelum dan Ran perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota komisi dan gabungan komisi diluar prioritas ran perda tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam pembentukan peraturan daerah.
 - f. Melakukan pembahasan, perubahan dan penyempurnaan rancangan perda yang secara khusus ditugaskan kepada badan pembentukan peraturan daerah.
 - g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi atau panitia khusus untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

- h. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah usul pemerintah daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
- i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan untuk membentuk panitia khusus pembahasan peraturan daerah atau rancangan peraturan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD.
- j. Melakukan penyelarasan terhadap peran perda yang akan disahkan menjadi perda.
- k. Menyampaikan hasil kerjanya selama tahun anggaran pada pimpinan dewan dan fraksi-fraksi.
- l. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

D. Badan Kehormatan

1. Toni Togatorop,SE.MM

Mempunyai tugas yaitu :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan tata cara DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib atau kode etik DPRD.

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan masyarakat.
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. JENIS KEGIATAN KKL

1. Administrasi

Pengertian administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan unuk mencapai tujuan,. Pengertian administrasi secara sempit ialah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan sebagainya yang mempunyai sifatteknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas ialah segala bentuk kerjasama dari dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana khusu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ciri ciri administrasi :

1. Ada kelompok manusia yang terdiri dari 2 individu atau lebih.
2. Adanya kerjasama
3. Adanya proses atau usaha.
4. Ada bimbingan, kepemimpinan., dan pengawasan.
5. Mempunyai tujuan.

Fungsi Administrasi :

1. Planning
2. Organizing

3. Staffing
4. Directing
5. Coordinating

Tujuan administrasi secara umum :

- Menrepakan dan meningkatkan kemampuan teknologi informasi agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien .
- Menerapkan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan dokumen sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dalam perusahaan.
- Menerapkan dan emningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi keuangan (accounting), agar proses pengelolaan aspek keuangan dapat dipertanggung jawabkan serta dilaporkan.

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang ebrtujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial . bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.

Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk mneunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

3. Rapat Paripurna

Rapat merupakan salah satu bentuk komunikasi tatap muka yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk membicarakan, merundingkan dan memutuskan suatu masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan adanya rapat, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Menurut The Liang Gie merumuskan rapat ialah pertemuan antara para anggota di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah yang menyangkit kepentingan bersama.

- LANGKAH MEMPERSIAPKAN RAPAT :
- 1. Membuat daftar acara
- 2. Membuat undangan
- 3. Mempersiapkan bahan rapat
- 4. Mempersiapkan perlatan rapat
- 5. Mempersiapkan peralatan rapat
- 6. Membuat catatan rapat
- 7. Mengirimkan catatan hasil rapat
- 8. Melakukan pekerjaan-pekerjaan tindak lanjut

• **TUJUAN RAPAT**

1. Untuk memberi informasi, artinya rapat yang bertujuan untuk menyampaikan penjelasan ataupun informasi kepada peserta rapat.
2. Untuk melakukan kerja sama, perusahaan sangat memerlukan kerja sama yang solid baik itu antara sesama karyawan maupun perusahaan lain.
3. Untuk mengatasi permasalahan. Umumnya kegunaan rapat yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan partisipasi aktif dari para peserta rapat.
4. Untuk memenuhi peraturan. Perusahaan tertentu membuat kebijakan untuk melakukan rapat dalam periode yang telah ditentukan, hal ini harus dipebahi agar perkembangan perusahaan tersebut dapat terpantau.

Adapun Rapat yang dilakukan Di DPRD yaitu Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan Forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas.

Penjadwalan dan acara rapat paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam rapat Badan musyawarah (BAMUS) atau rapat konsultasi pengganti Rapat BAMUS Antara pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi, atau rapat paripurna itu sendiri.

C. KEGIATAN SELAMA KKL

- Hari Pertama, Saya Keruangan Tata Usaha DPRD Prov Su Lalu mereka menempatkan saya di Fraksi hanura .
- Hari kedua, Saya Diberikan pengarahan sekilas tentang demokrasi dan politik oleh ketua fraksi hanura.
- Hari ketiga, saya mengikuti senam pagi dan membuat data rumah ibadah yang diajukan oleh anggota dewan fraksi partai hanura DPRD Prov-Su ke kantor gubernur.
- Hari keenam, saya memeriksa data rumah ibadah yang dana nya sudah cair.
- Hari ke tujuh dan kedelapan, Saya tidak ada mengerjakan sesuatu karna dewan tidak ada .
- Hari kesembilan,saya membuat klipring tentang berita partai fraksi hanura di koran.
- Hari kesepuluh, saya mengikuti senam pagi
- Hari ke tiga belas, Saya tidak ada mengerjakan sesuatu karna dewan tidak ada .
- Hari keempat belas, saya membuat data rumah ibadah yang diajukan oleh anggota dewan fraksi partai hanura DPRD Prov-Su ke kantor gubernur, dan membuat laporan kegiatan tenaga ahli/tim ahli wakil ketua IV DPRD Prov-Su.
- Hari kelima belas, saya menulis data surat masuk di lembar disposisi .
- Hari ke enam belas, saya menulis data surat masuk di lembar disposisi, mengikuti rapat paripurna isitimewa dewan (mendengar pidato kenegaraan

presiden republic Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD di gedung MPR. DPR Dan DPD Dalam rangka HUT proklamasi kemerdekaan RI Ke-73) dan mengikuti rapat paripurna isitimewa (peresmian dan pengucapan sumpah/janji wakil ketua DPRD provinsi Sumatera utara sisa masa jabatan 2014-2019).

- Hari ke dua puluh, saya mengikuti rapat paripurna isitimewa menggantikan Bapak sopar siburian SH dengan bapak samsul sianturi SH Dan Mengikuti Rapat Paripurna Dewan Pemndangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda : Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.
- Hari ke duapuluh satu, saya membuat data rumah ibadah yang diajukan oleh anggota dewan fraksi partai hanura DPRD Prov-Su ke kantor gubernur.
- Hari keduapuluh dua, saya tidak ada mengerjakan sesuatu karna dewan tidak ada..
- Hari keduapuluh tiga, saya membuat kliping tentang berita partai fraksi hanura di Koran.
- Hari keduapuluh empat, saya tidak ada mengerjakan sesuatu karna dewan tidak ada. .
- Hari keduapuluh tujuh, saya menulis data surat masuk di lembar disposisi, mengantar surat permohonan tugas ke ruangan sekwan, dan juga mengantar surat ke ruangan sekwn.
- Hari keduapuluh delapan, saya mengantar surat permohonan tugas ke ruangan sekwan.

- Hari ke dua puluh Sembilan dan ketiga puluh, saya tidak ada mengerjakan sesuatu karna dewan tidak ada .
- Hari ketiga puluh satu, adalah acara [er[isahan dengan staff yang ada di fraksi partai hanura.

C. ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan yang sering saya lakukan selama KKL di DPRD Prov-Su adalah saya membuat data rumah ibadah yang diajukan oleh anggota dewan fraksi partai hanura DPRD Prov-Su ke kantor gubernur, dan membuat laporan kegiatan tenaga ahli/tim ahli wakil ketua IV DPRD Prov- Su. Dan juga mengikuti rapat paripurna guna mengetahui cara atau mekanisme yang ada di rapat paripurna tersebut dan dibimbing dengan staff yang ada di fraksi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Saya melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan di DPRD Prov-Su dilakukan selama satu bulan. Di dalam kegiatan KKL ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Dari kegiatan membuat data rumah ibadah yang diajukan oleh anggota dewan fraksi partai hanura DPRD Prov-Su ke kantor gubernur, dan mengikuti rapat paripurna istimewa dewan, saya menjadi tahu apa saja yang dilakukan di DPRD Prov-Su tersebut.

Selama sebulan saya melaksanakan KKL ini saya menjadi tahu tentang tugas dan fungsi setiap anggota dewan dan saya juga tahu bagian apa saja yang terdapat di DPRD Prov-Su .

Dalam kegiatan KKL ini saya juga melihat permasalahan yang ada pada pegawai yang ada di DPRD tersebut yaitukurangnya kedisiplinan para pegawai termasuk waktu masuk kantor dan pada jam kerja ada staff yang tak ada di ruangan.

B. SARAN

Selama Pelaksanaan KKL Di DPRD Prov-Su saya melihat pegawai yang kurang disiplin misalnya dalam hal Absensi. Karna absensi di DPRD Prov-Su itu berbeda antara pegawai yang PNS dengan Honor atau pun Staff Ahli nya. Maka dari itu honor dan staff nya datang tidak tepat waktu, saran saya Absensi untu pegawai yang PNS,honor atau pun staff nya semua memakai fingerprint, jadi tidak ada lagi pegawai yang terlambat dan dapat datang ke kantor pada waktu yang sudah ditentukan.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N**

prdsunut@gmail.com

Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2017 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini
nyatakan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Universitas Medan Area, yaitu :

NAMA	NPM
Rizqy Salam Lubis	158520003
Dinda Emilia	158520005
Junita Dewi Pratama	158520013
Sinta Kismi Hana	158520020
Shintia Devi Simbolon	158520034
Putri Dita Pratama Marpaung	158520040

telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 Agustus 2018

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KABAG UMUM



AHMADEFFENDI, S.Sos. MSP
PEMBINA TK.I
NIP. 19620606 198503 1 011